

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam, 1981, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Busroh, Abu Daud, 1990, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Isjwara, Fred, 1974, *Pengantar Ilmu Politik*, Binacipta, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Kaho, Josef Riwu, 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M., Sri Soemantri, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Mahfud MD. Moh., 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasojo, Eko dan Hariwanti, Ninik, 2011, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pusat dan Daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Riyanto, Sigit, dkk, 2013, *Keterampilan Hukum: Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Bahan Kuliah*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Jurnal, Skripsi, Tesis dan Laporan Akhir

Thontowi, Jawahir, 2009, “Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY)”, *Jurnal Hukum*, No. 2, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Dita, Laura, 2014, “Tinjauan Yuridis Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir”, *Skripsi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Handayani, Julia Andy, 2001, “Analisis Perdagangan Luar Negeri Indonesia Dengan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara: Studi Kelayakan Dalam Menyongsong Era *Asean Free Trade Area*”, *Tesis*, Magister Manajemen UGM, Yogyakarta.

Tim Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, INTRA Insight, 2014, “*Selamat Datang UU Perdagangan Selamat Tinggal Ordonansi*”, Publikasi Internal, Edisi Perdana, Jakarta.

Firmanzah, 2014, “RUU Perdagangan, Pasar dan UMKM”, *Desain Hukum*, Vol. 14, No. 4, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Atas Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 339).

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 397 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal.

Internet

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Image/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf, diakses pada 12 Oktober 2017.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, <http://api.kemendag.go.id/portal.php/home/view/penerbit-api>, diakses pada tanggal 5 Mei 2018.